

Laporan Tahunan 2018



MEMPERKOKOH LANDASAN,
MENINGKATKAN INOVASI & KREATIFITAS

Daftar Isi

Laporan Strategi

- 01 Highlight
- 02 Produk Unggulan
- 03 Skema Penjaminan
- 04 Kinerja 4 tahun
- 05 Sambutan Dewan Komisaris
- 06 Sambutan Direksi

Profil Perusahaan

- 01 Sasaran Perusahaan
- 02 Model Bisnis

Tata Kelola Perusahaan

- 01 Laporan Pelaksanaan Praktik tata kelola perusahaan yang baik
- 02 Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris

Laporan Keuangan

- 01 Neraca
- 02 Rugi Laba
- 03 Arus Kas
- 04 Penyertaan Modal
- 05 Catatan Laporan Keuangan

Informasi lainnya

- 01 Informasi Kontak
- 02 Jaringan kantor pelayanan

“ PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi MAMPU menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat ”

Highlights

Kinerja kami mencerminkan fokus kepada pelanggan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan

Laba sebelum Pajak

Rp 11,55 M
(2017 : Rp 7,44 M)

Return on Asset

5,1%
(2017 : 3,2%)

Rasio Klaim terhadap IJP

42.41%
(2017 : 24%)

Total Aset

Rp 227,5 M
(2017 : 172,9 M)

Gearing Ratio

17,8 Kali
(2017 : 14,6 Kali)

Laba Operasi

Rp 10,37 M
(2017 : 6,47)

Rasio Likuiditas

514%
(2017 : 602%)

Pendapatan Asli Daerah

Rp 4,73 M
(2017 : 3,07 M)

Penjaminan Produktif

28,3%
(2017 : 27,8%)

Catatan : M = Milyar

Kami memberikan penjaminan kredit
kepada UMKM ,
memberikan penjaminan yang perlu dilakukan
dengan tujuan meningkatkan penghasilan masyarakat
di Jawa Tengah

Baik penjaminan bagi petani, peternak, pedagang,
nelayan, usaha jasa, *Business start up*,
kontraktor , usaha ekspor dan usaha lainnya

Kekuatan kami terletak pada keragaman
pelayanan, , menawarkan berbagai produk,
dan masuk ke berbagai segmen/pasar,
didukung oleh tekad yang kuat dengan tujuan
memberikan nilai lebih
bagi pelanggan, pemegang saham
dan pemangku kepentingan lainnya

Produk Unggulan

Penjaminan Kredit Produktif



Kami menjamin Kredit Produktif untuk UMKM dengan tujuan membantu akses permodalan ke lembaga keuangan bank / non bank dan koperasi

IJP Gross
Rp11,86 M

Penjaminan Bersih

Rp4,78 M

Penjaminan Kredit Non Produktif



Kami menjamin kredit non produktif untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui skema potong gaji atau setor aktif

IJP Gross
Rp41,04 M

Penjaminan Bersih

Rp26,71 M

Surety Bond/ Bank Garansi



Kami memberikan kemudahan kepada pengguna anggaran untuk menjamin proyek yang berasal dari APBD / APBN/ Swasta

IJP Gross
Rp2,59 M

Penjaminan Bersih

Rp1,95 M

Custom Bond



Kami memberikan kemudahan penjaminan yang diberikan kepada Importir & Exportir yang berkaitan dengan fasilitas penundaan, pembebasan bea masuk dan kewajiban kepabeanan lainnya untuk kepentingan negara

IJP Gross
Rp110 Jt

Penjaminan Bersih

Rp110 Jt

Skema Penjaminan

Setiap pelanggan adalah unik , produk kami menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kami juga melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan produk melalui dua skema penjaminan :

Penjaminan Langsung

Kami mencari nasabah secara langsung dengan melakukan penilaian kelayakan usaha , apabila usaha layak dibiayai maka kami memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan / koperasi yang telah bekerjasama untuk memberikan pinjaman yang akan dijamin oleh kami

Nilai Penjaminan

Rp45 Milyar

Penjaminan Tidak Langsung

Penjaminan nasabah dilakukan melalui lembaga keuangan / koperasi yang telah bermitra dengan kami , memberi pilihan kepada mitra tentang bagaimana penjaminan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah

Nilai Penjaminan

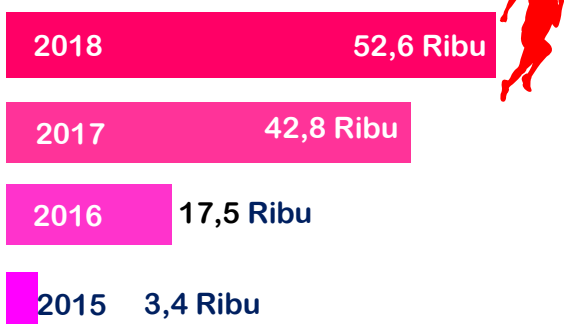
Rp2,7 Triliun

Kinerja 4 Tahun

HIGHLIGHT

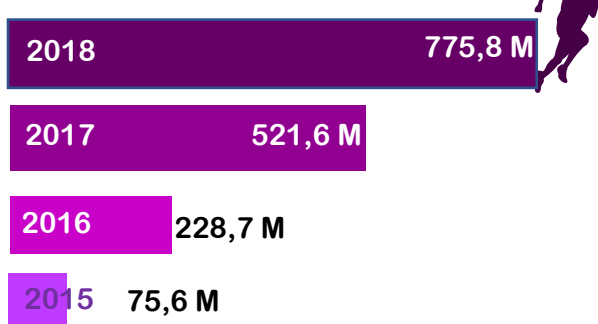
Jumlah Terjamin Produktif (Ribuan)

52,6 Ribu



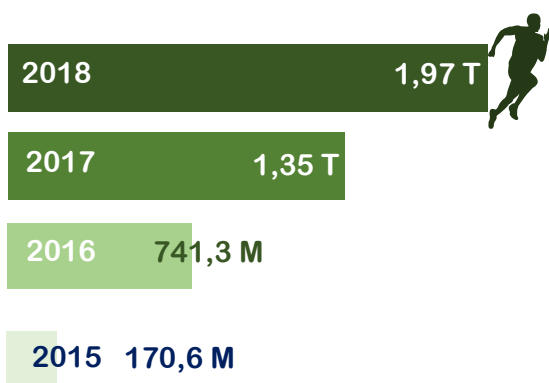
Nilai Penjaminan Produktif (Rupiah)

775,8 M



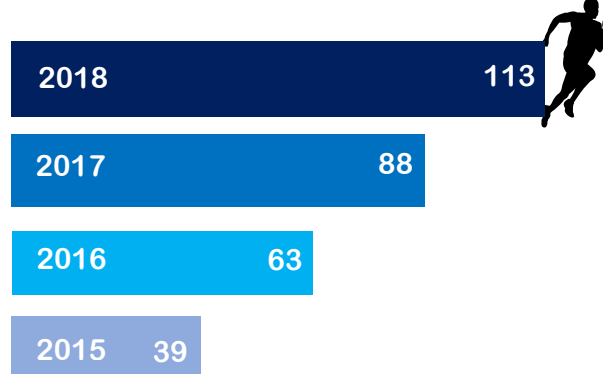
Nilai Penjaminan Multiguna (Rupiah)

1,97 T



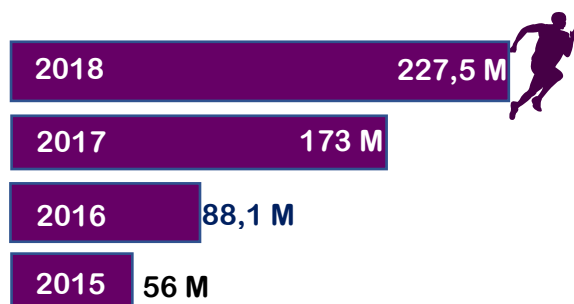
Jumlah Perjanjian Kerjasama

113 Perusahaan



Total Asset - Rupiah

227,5 M



Tingkat Kesehatan Keuangan

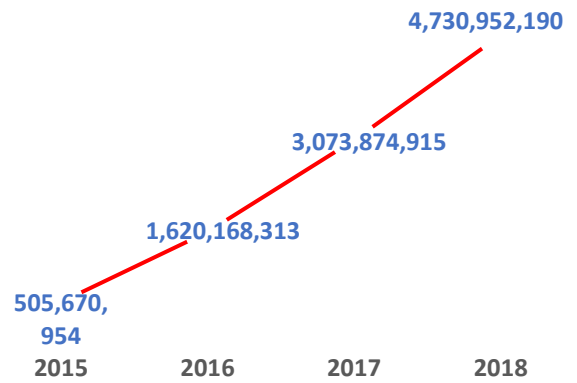
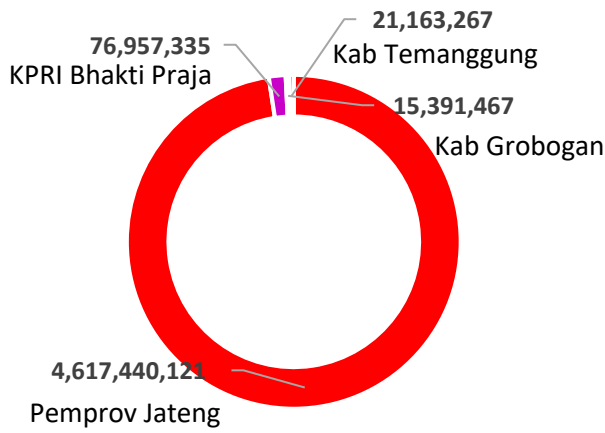
Kriteria	Nilai
Sangat Sehat	1 < TKK < 1,8



Current Ratio : 514%	Gearing Ratio : 17.8 Kali
ROA : 5.08%	
BOPO : 66.9%	Claim Ratio : 42.41%

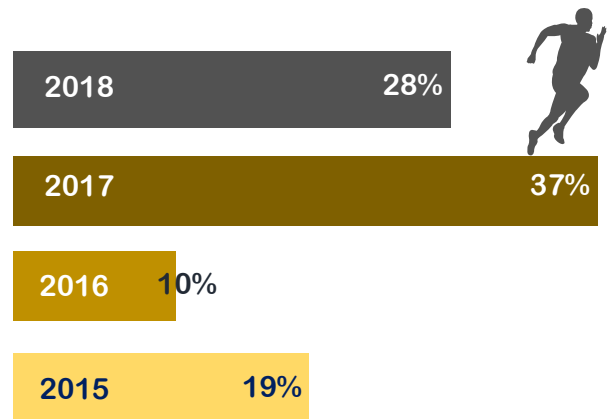
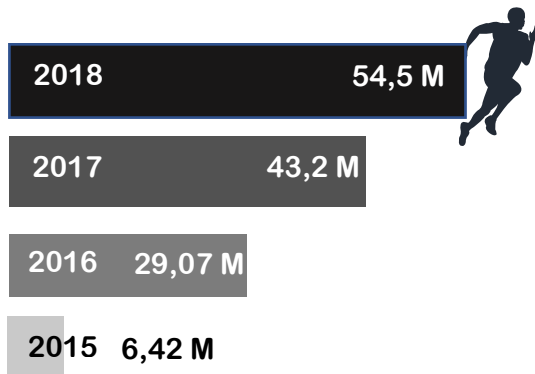
Pendapatan Asli Daerah 2018- Rp
4,73 M

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-Rp



IJP Cash Basis (Rupiah)
54,5 M

Net Profit Margin (%)
28%



Penjaminan UMKM & *return* yang berkelanjutan



Pada tahun 2018, Perusahaan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp11,55 Milyar (2017: Rp7,44 Milyar). Portofolio produk dan saluran Distribusi yang terdiversifikasi, penjaminan yang *prudent* dan komitmen karyawan kami telah membantu kami mencapai hasil yang baik



Para Pemangku kepentingan yang terhormat,

Kami mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kinerja perusahaan pada tahun 2018 ini menunjukkan berbagai pencapaian yang luar biasa.

Strategi

Dewan komisaris mendukung manajemen untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan di didirikan. Strategi kami adalah fokus kepada bisnis penjaminan kepada UMKM, dan kegiatan usaha lainnya melalui *multi-channel distribution*, untuk memungkinkan kami memberikan penjaminan kepada pelanggan kami masa sekarang dan di masa depan.

Pelanggan, budaya, dan perilaku

Memenuhi kebutuhan pelanggan kami adalah inti dari strategi dan keberlanjutan Perusahaan. Dewan Komisaris mendorong Manajemen Perusahaan untuk “menangkap peluang” yang dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan, kemampuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, Dewan Komisaris juga mendorong berbagai inisiatif pengalaman pelanggan yang dirancang untuk memberikan peningkatan tingkat kepuasan pelanggan.

Dewan Komisaris mempromosikan budaya terbuka dan kolaboratif, dan memberikan pengawasan atas perilaku Perusahaan.

Current Ratio dan Pendapatan Asli Daerah

Dengan ekspansi bisnis yang dihasilkan di tahun 2019, Posisi *Current Ratio* adalah 514% dan masih berada pada posisi yang aman , dimana OJK mensyaratkan *current ratio* minimal 120%, Pendapatan Asli meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Karenanya, Dewan komisaris telah merekomendasikan PAD kepada pemegang saham sebesar Rp 4,7 Milyar meningkat 53% (2017 : 3,073 Milyar). Ini mencerminkan kepercayaan Pemegang Saham yang berkelanjutan pada pendapatan perusahaan dan kemajuan yang terus dilakukan.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Dewan komisaris terus memberikan pengawasan terhadap program kegiatan yang ambisius untuk meningkatkan dan mengintegrasikan lebih baik sistem Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemajuan yang baik telah dibuat dalam bidang ini dan 2019 ditetapkan sebagai tahun yang penting bagi perusahaan dalam hal *Integrated System*

Investasi kami dalam teknologi dan digitalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, kelincahan dan efisiensi.

Perusahaan juga memiliki Pedoman Perilaku karyawan yang menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh karyawan .

Karyawan

Karyawan sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan dan untuk memastikan tingkat layanan yang tinggi kepada pelanggan . Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas kerja keras, inisiatif dan komitmen untuk mendukung misi perusahaan. Energi positif , perwujudan nilai-nilai Perusahaan dan dedikasi yang tak tergoyahkan kepada pelanggan telah membantu bisnis berkembang selama 4 (empat) tahun berturut turut, dan telah menempatkan PT Jamkrida Jateng pada posisi yang baik untuk masa depan.

Semarang, 10 Agustus 2019

Atas nama Dewan Komisaris

Sujarwanto Dwiatmoko

Komisaris Utama

Fokus kepada kebutuhan pelanggan



Serangkaian hasil yang memuaskan didorong oleh model bisnis yang tangguh menjadikan perusahaan selama 4 tahun berturut-turut berkinerja di atas rata-rata industri penjaminan

Kepada Pemegang Saham dan Seluruh Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Saya gembira menyampaikan serangkaian hasil yang memuaskan di atas rata-rata industri penjaminan yang didorong oleh model bisnis perusahaan yang tangguh dan berpusat pada pelanggan.

Kami terus membuat kemajuan operasional yang signifikan pada tahun 2018 dan menuju tahun yang penting pada tahun 2019, dengan tujuan memberikan batu loncatan untuk menumbuhkan kontribusi dari profitabilitas tahun berjalan.

Kami mempertahankan disiplin biaya yang baik pada tahun 2018 dan bertekad untuk meningkatkan kinerja kami.

Updgrade Teknologi dan efisiensi yang lebih baik, pada saatnya, dirancang untuk mendukung kami untuk berinovasi lebih cepat dan menemukan cara-cara baru

Kinerja bisnis

Mengakhiri tahun 2018 Perusahaan telah menghasilkan laba selama 4 tahun berturut, Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sendiri naik secara signifikan 54% dari tahun 2017. Kami mencapai laba sebesar Rp8,6 Milyar (2017: Rp5,58Milyar). Secara keseluruhan, rasio keuangan tahun berjalan sangat baik dan *grade* tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah "sangat sehat", hal ini ditopang oleh produk yang terdiversifikasi, manajemen risiko yang *prudent* serta biaya operasional yang rendah.

Regulasi

Perusahaan terus beroperasi dalam regulasi yang sangat dinamis dan berkembang, di mana terdapat sejumlah tinjauan dan inisiatif dilakukan termasuk inisiatif ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap tata cara pengakuan pendapatan secara *accrual basis*.

untuk melayani pelanggan kami saat tuntutan mereka berkembang.

Secara finansial, kami terus melihat manfaat dari meningkatnya efisiensi operasional kami, yang telah memberikan kontribusi bagi laba sambil terus berinvestasi dalam bisnis dan mempertahankan *current ratio* dan *gearing ratio* secara bijak.

Investasi dalam teknologi

Sebagian besar proses pekerjaan telah diotomatisasi, kami melanjutkan program untuk membangun IT secara terintegrasi. Sistem yang baru telah diuji pada akhir tahun 2018, dirancang untuk membuat penjaminan lebih mudah bagi pelanggan kami. Selain itu *core system* dirancang untuk mengelola data internal dan eksternal secara lebih efektif untuk meningkatkan akurasi perhitungan profil risiko penjaminan.

Meningkatkan Efisiensi

Kami menyadari sangat penting untuk beroperasi secara efisien. Selama empat tahun terakhir, kami telah membuat langkah signifikan dalam mengurangi biaya kami, Tindakan yang telah kami ambil mendukung pengurangan rasio biaya operasi dan untuk terus mengubah bisnis kami dan meningkatkan efisiensi sebagai daya saing jangka panjang

Investasi pada karyawan berbakat

Kesuksesan bisnis ini merupakan komitmen dan dedikasi karyawan kami yang menggunakan "keahlian" untuk melayani pelanggan. Latar belakang yang beragam dan rasa tanggung jawab yang tinggi merupakan investasi untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Survey yang telah dilakukan kepada pelanggan kami, menunjukkan hasil yang memuaskan, Ini adalah pencapaian besar dan merupakan bukti nilai tambah yang kami berikan kepada pelanggan

Outlook

Perusahaan menargetkan biaya operasional antara 95% hingga 97% untuk 2019 dan dalam jangka menengah, akan disesuaikan dengan perkembangan perusahaan, cadangan klaim tahun 2019 ditingkatkan, tingkat reasuransi yang dibeli oleh Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi profil risiko penjaminan.

Peningkatan laba yang ditargetkan dalam tahun berjalan didukung oleh investasi signifikan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pemegang saham untuk dapat memberikan penyertaan modal sesuai dengan modal dasar yang telah ditetapkan.

Selain itu, Perusahaan menargetkan untuk meningkatkan efisiensi. Pada 2019, Perusahaan akan membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengurangi biaya operasi dan menargetkan biaya operasi di bawah 100% dari Anggaran.

Kami menargetkan kenaikan laba sebesar 12% dari realisasi laba tahun 2018, kami berencana meningkatkan fleksibilitas kami untuk menghadapi perubahan kebutuhan bisnis, menawarkan lebih banyak layanan dengan kombinasi kegiatan usaha dan karyawan-karyawan berbakat akan membantu perusahaan mewujudkan misinya yaitu membuat penjaminan lebih mudah dan memberikan nilai tambah kepada stakeholder.

Semarang, Juni 2019

Atas nama Direksi

M Nazir Siregar

Direktur Utama



PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PROFIL PERUSAHAAN

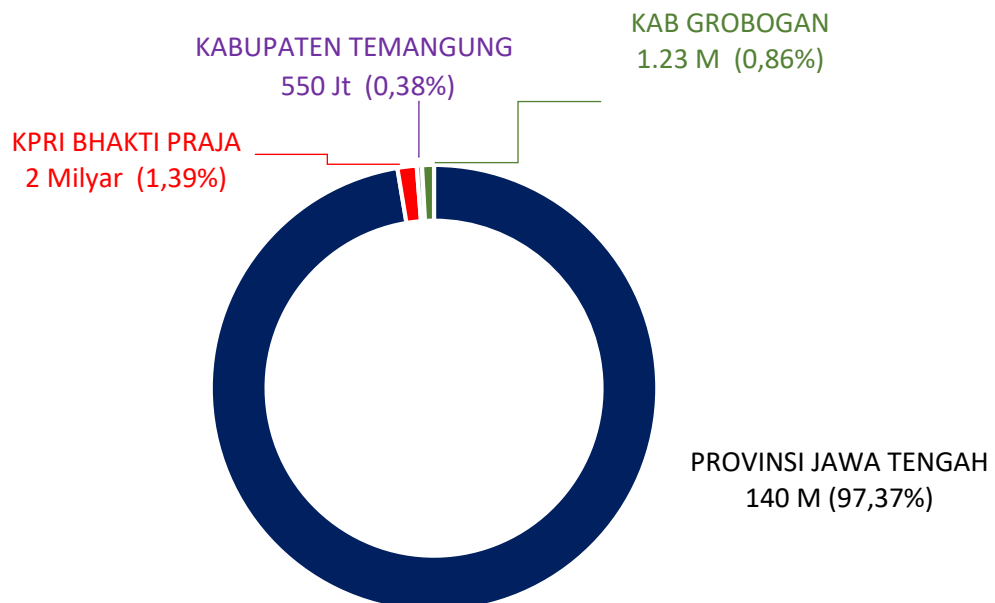
PT Jamkrida Jateng memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015

Di tahun 2018 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (*Cash Basis*) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 54,5 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 113 Mitra

PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, *surety bond*, *custom bond*, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah.

Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional, Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 184.000 Terjamin di Jawa Tengah

Komposisi Pemegang Saham



VISI & MISI



Visi 2039 bersifat Dinamis, Visi Jamkrida Jateng dan rencana yang akan diwujudkan akan berkembang menjadi perusahaan yang membuat perubahan di industri penjaminan ,

Jamkrida Jateng percaya bahwa kemajuan yang berkelanjutan didorong oleh orang-orang yang mempunyai imajinasi dan antusiasme yang tinggi untuk memperbaiki masa depan kita dan masa depan dari orang di sekitar kita .

VISI

Kami memberdayakan karyawan, mitra dan nasabah untuk mewujudkan **visi “menjadi yang Terbaik dalam keamanan penjaminan kredit , terdepan dalam pelayanan penjaminan kredit di Indonesia”**

MISI

Misi kami adalah menjadi mitra solusi bagi nasabah kami , memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

Nilai-nilai Perusahaan

I SAFE

Untuk mencapai Visi Misi dan Strategi Perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas



Integritas

Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan *good corporate governanccce*



Sinergi

Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya



Antusias

Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, keberanian dan Menghargai perbedaan



Fokus Pada Solusi

Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan pelanggan

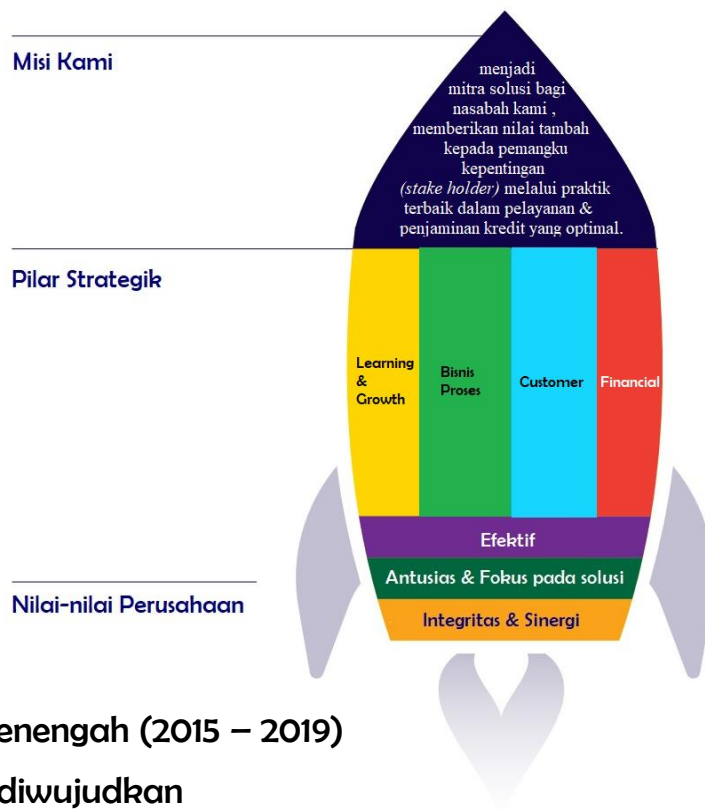


Efisien & Efektif

Kami mencari cara yang efektif & efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas

Strategi Perusahaan

Sasaran Jangka Panjang 25 Tahun



Sasaran Jangka Menengah (2015 – 2019)

Sukses yang akan diwujudkan

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan	Perspektif Bisnis Proses	Perspektif Customer	Perspektif Financial
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil output sumber daya harus positif dengan <i>benchmark</i> perusahaan yang sejenis Jamkrida Jateng, Penyempurnaan system dan inovasi ditingkatkan. ✓ Pembenahan di sisi HULU yaitu analisis beban kerja, analisis tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. ✓ Pengembangan pelatihan dan pendidikan. ✓ Standarisasi gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fokus Pelayanan Optimal kepada nasabah ✓ Pengembangan Infrastruktur termasuk pengembangan <i>Web based</i>, data dan informasi berbasis digital dengan penggunaan "<i>user friendly</i>" ✓ Klaim: reputasi penanganan klaim yang cepat, tepat dan adil ✓ Efisien & Efektif dalam melakukan proses dan tindakan ✓ Diversifikasi Produk Penjaminan ✓ Mitigasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan secara akumulasi Rp 75 Milyar (Moderat), Rp 95 Milyar (Optimis) ✓ Meningkatkan <i>Market Share</i> Jaminan Kredit dari Pendapatan IJP Nasional ✓ Mengembangkan jaringan Distribusi & Promosi ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik ✓ Target Portfolio Produksi 80% Jaminan Kredit 20% Non penjaminan Kredit ✓ <i>Benchmarking</i> & <i>Rating</i> Pefindo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan modal & asset sebesar Rp 200 Milyar untuk dapat melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia ✓ Diversifikasi Investasi dengan tingkat pengembalian positif ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik ✓ Aktif dalam melakukan <i>Corporate Social Responsibility</i> ✓ Perusahaan dengan kategori sehat (kategori A)

Menciptakan Nilai Tambah bagi Stakeholder

Kegiatan usaha kami dan multi saluran distribusi menawarkan berbagai pelayanan kepada pelanggan yang berbeda. Kami percaya pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dan imbal balik yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

Kekuatan Kami

Fokus pada Customer

Kami menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, Kegiatan usaha dan saluran distribusi bertujuan untuk mempermudah akses penjaminan dan memberikan nilai tambah . Layanan klaim yang cepat, akurat dan efisien, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan

Karyawan Berbakat

Kami berinvestasi kepada karyawan yang berbakat, mendorong semua karyawan agar bekerja secara optimal, inovasi dan kreatifitas ditingkatkan sehingga kami secara terus menerus dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang

Data & Teknologi

Kami memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelanggan dan karyawan. Kami bertujuan menggunakan teknologi yang fokus kepada pelanggan.

Modal & Kekuatan Keuangan

Kami memiliki model bisnis yang sederhana, namun *powerful* dalam menghasilkan pendapatan, penjaminan risiko yang selektif, pengelolaan klaim, pengendalian biaya , memenuhi kebutuhan pelanggan dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi pemegang saham

Layanan Kami

01 Penjaminan Kredit

02 Surety bond

03 Customs Bond

04 Kontra Bank Garansi

Tingkat Pengembalian

Kami berusaha memastikan bisnis kami dilakukan dengan baik dan terkendali. Kami mengelola keuangan dengan hati-hati dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

IJP Bersih



Klaim Bersih



Biaya



Investasi & Pendapatan lainnya



Profit

Nilai yang berkelanjutan

Karyawan

Karyawan merupakan aset perusahaan, kami berinisiatif mengembangkan, menciptakan nilai budaya berkinerja tinggi berdasarkan keragaman, pelatihan dan fokus kepada nasabah

Proses Bisnis

Kami secara terus menerus memperbaiki proses yang ada agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien

Customer

Kami menawarkan penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan layanan optimal serta memelihara hubungan emosional dengan mitra

Financial

Kami bertujuan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan meningkatkan penjaminan bagi UMKM/Usaha produktif

DEWAN KOMISARIS



Ir Sujarwanto Dwiarmoko, Msi

Komisaris Utama

Pria, kelahiran Klaten, lulus S1 dari Fakultas Teknik Geologi UPN "VETERAN" tahun 1984, S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada tahun 1990, S3 Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro

Berbagai bidang telah ditangani diantaranya Kepala Balai Pertambangan dan Energi Wilayah Seayu, Kepala Sub Dinas Pengawasan, PLT Kepala Dinas Pertambangan & Energy Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah

Memimpin Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah selama 5 tahun periode 2010 - 2015. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah tahun 2016. Dan di tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, Satya Lancana Karya 20 tahun dan Satya Lancana Pembangunan (bidang Koperasi dan UMKM)

Warsito Ellwein

Komisaris

Pria, kelahiran Klaten, Fasih berbahasa Jerman & Inggris, Aktif dalam organisasi pengembangan & pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris/direktur pelaksana tahun 1982-1987, Lembaga Pendidikan politik di Jerman dalam kurun waktu 1987 - 2010 diantaranya Lembaga Suedostasi, Deutsche Stiftung & Lembaga Friedrich Naumann Stiftung, Visi beliau sangat jauh kedepan, keberpihakan terhadap UMKM dapat segera diwujudkan, "tindakan kita hari ini menentukan masa depan sampai ke anak cucu kita" Saat ini dipercaya sebagai Staff Khusus Gubernur provinsi Jawa Tengah bidang kedaulatan pangan.



DIREKSI



M Nazir Siregar

Direktur Utama

Pria, Kelahiran Marbau – Sumatera Utara, Menyelesaikan Pendidikan S1 di STMA (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi) Trisakti tahun 2004, dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 3.

Pengalaman di Industri Asuransi Jiwa selama 17 tahun lebih, berkarir di PT AJ Manulife Indonesia lebih dari 11 tahun dari tahun 1997 s.d tahun 2008, 6 tahun di Perusahaan asuransi Jiwa *Join Venture* dan Nasional dengan berbagai tanggung jawab dibidang Operasional, Marketing, Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategi.

Mendapat Gelar :

- Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) dari AAMAI
- Fellow Life Management Institute (FLMI) dari LOMA
- Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) dari PAMJAKI
- Associate Customer Service (ACS) dari LOMA
- ANZIIF Associate CIP

Adi Nugroho

Direktur

Pria, Kelahiran Yogyakarta, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1995, pendidikan S2 di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta tahun 2001 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 4

Pengalaman di Industri Penjaminan & Lembaga Keuangan selama 18 tahun lebih, Berkarir di Perum Jamkrindo periode 1996 – 2004, PT Permodalan Nasional Madani (persero) periode 2005 – 2011, Bank Andara periode 2011 - 2013 & PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode 2013 – 2014 dengan berbagai tanggung jawab di Bidang Operasional & Pemasaran

Mendapatkan penghargaan :

- Best Team Lending Se Indonesia dari PT Bank Andara tahun 2012
- Cluster Manager Terbaik se Jawa Tengah dari PT PNM (Persero) tahun 2009.



KEPALA DIVISI



Joko Haryanto

Kepada Divisi Customer Relation

Pria, Kelahiran Wonogiri – Jawa Tengah 23 Mei 1961, menyelesaikan Pendidikan Akademi di STIE AUB Pancasila Surakarta tahun 1985.

Berpengalaman di industri Asuransi selama lebih dari 29 tahun, antara lain pernah berkarir di PT. Asuransi Tugu Bunas General Insurance (BUN Group) Semarang, Jakarta dan Solo periode 1991 – 1997, PT. Asuransi Ikrar Loyd General Insurance (Bakrie Group) Semarang dan Jogja periode 1999 – 2004, PT. Asuransi Intra Asia General Insurance Semarang periode 2006 – 2012, dengan berbagai tanggung jawab di bidang Akseptasi, Keuangan, dan Marketing.

Menjalani Pendidikan profesi :

- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) “ Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Dasar “C” di Jakarta LULUS Tahun 1991.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) “ Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Lanjutan “B” Non Marine di Jakarta LULUS Tahun 1995.

Meidhi Suryadi

Kepala Divisi Finance Accounting & Investasi

Pria, kelahiran Surabaya 8 Mei 1963, menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi Perbankan di UPN Veteran Jakarta tahun 1988.

Berpengalaman di bidang Asuransi dan Leasing selama kurang lebih 27 tahun, berkarir di PT. Air Multi Finance Corp periode 1990 – 1997, PT. Asuransi Jiwa Bakrie periode 2002 – 2010, PT. Asuransi Jiwa Recapital periode 2011 – 2016, dan 7 tahun di perusahaan Leasing & Contractor dengan berbagai tanggung jawab di bidang Accounting, Finance, HRD dan GA.

Mendapat Gelar :

Best Motivator Team Building di Perusahaan Bakrie Grup pada tahun 1998





LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT JAMKRIDA JATENG

Setiap tahun Jamkrida Jateng selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara maksimal. Di tahun 2018 ini Jamkrida Jateng telah berhasil melakukan peningkatan-peningkatan yang diperlukan dalam penerapan Good Corporate Governance (“GCG”) untuk mencapai visi-nya menjadi penyelenggara jasa penjaminan yang terdepan di Indonesia, dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan penjaminan nasabah kami.

Setiap tahun, Jamkrida Jateng melakukan penilaian mandiri secara berkelanjutan atas penerapan tata kelola perusahaannya. Penilaian mandiri ini didasari oleh POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga penjamin

Jamkrida Jateng juga telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan tersebut di atas digunakan oleh Jamkrida Jateng dalam mengembangkan pelaksanaan nilai-nilai GCG didalam perusahaan.



LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

I. PENDAHULUAN

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan fungsi pengawasan

PT Jamkrida Jateng (“Perseroan”) untuk kemudian dituangkan ke dalam laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah dilakukan selama tahun 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Laporan Hasil Pengawasan”).

II. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris PT Jamkrida Jateng sehubungan dengan kebijakan pengelolaan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, berikut Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan:

a. Keuangan & Solvensi

Dewan Komisaris Perusahaan telah melakukan pengawasan dan penelaahan atas keadaan keuangan Perusahaan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Richard Risambessy & Rekan

Di tahun 2018, Rasio likuiditas Jamkrida Jateng mencapai 514%, menurun dari 602% di tahun 2017. Namun posisi ini masih jauh di atas persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 120%.

Penurunan Rasio Likuiditas Jamkrida Jateng di 2018 dibandingkan 2017 sebagai dampak dari Ekspansi Perusahaan di tahun 2018. Pertumbuhan kinerja yang tetap stabil ditandai dengan total Imbal Jasa Penjaminan yang meningkat dari tahun sebelumnya, Jamkrida Jateng juga membayar klaim nasabah, sejumlah lebih dari Rp25,85 Milyar di 2018.

Kekuatan finansial dan pertumbuhan berlanjut ini memungkinkan Jamkrida Jateng menghormati komitmen terhadap para nasabahnya dan membantu menjamin lebih banyak UMKM di masa depan. Jamkrida Jateng tetap fokus pada visinya untuk memberikan yang terbaik bagi penjaminan di Indonesia.

b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Dalam menjalankan peran pengawasannya sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi, untuk memastikan semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang sebelumnya ditetapkan dan disetujui untuk tahun yang dilaporkan. Dewan Komisaris juga meninjau dan mempertimbangkan rekomendasi dari pemegang saham untuk memastikan semua kegiatan Perusahaan akan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

c. Laporan Keluhan Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Bahwa setelah dilakukan penelaahan atas laporan klaim sepanjang tahun 2018 yang disampaikan tim klaim Perusahaan menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi standar dari pelayanan dan penyelesaian klaim yang baik.

III. PENUTUP

Dewan Komisaris menyadari sepenuhnya persaingan industri penjaminan yang terjadi di tahun 2018, oleh karenanya Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi senantiasa menempatkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepentingan Terjamin, menjalankan bisnis dengan menjaga kecukupan likuiditas, memelihara kualitas aktiva produktif, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja dari karyawan Perusahaan antara lain melalui berbagai perubahan fundamental.

Akhir kata, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan kepada Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan atas dedikasi usaha dari seluruh karyawan Perusahaan pada tahun 2018.

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	M. Nazir Siregar	Direktur Utama	No : KEP-132/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2014 (4 tahun)	Indonesia	Perumahan Duta Bukit Mas, Jl Duta Indah No 31 Banyumanik Semarang
2.	Adi Nugroho	Direktur	No : KEP-133/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2014 (4 tahun)	Indonesia	Jalan Kradenan Asri D-23, RT.002/ RW.011, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Semarang
3.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	No : KEP-134/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2014 (4 tahun)	Indonesia	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/ No.1028 Semarang
4.	Warsito Ellwein	Komisaris	No : KEP-167/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2014 (4 tahun)	Indonesia	Jati Padang RT.013/ RW. 002, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
-	-	-	-	-	-	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
-	-	-	-	-

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.

Dewan Komisaris

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 a. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	Ketua	KPRI Bhakti Praja	Koperasi
			Kepala	Dinas ESDM Prov. Jateng	Pemerintahan
2.	Warsito Ellwein	Komisaris	Staff Khusus	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintahan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

- a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	M. Nazir Siregar	ISO 31000 Series 1 : ERM Fundamentals	2 s.d 6 Juli 2018	Yogyakarta
2.	Adi Nugroho	ISO 31000 Series 1 : ERM Fundamentals BSMR Level IV	3 s.d 7 September 2018	Yogyakarta
			18 Agustus 2018	Jakarta

- b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training / Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Selama periode tahun buku 2018, kegiatan Dewan Komisaris masih difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum mempunyai Komisaris Independen

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan 12 (dua belas) kali selama tahun 2018

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. NAZIR SIREGAR	12	0	100%
2.	ADI NUGROHO	12	0	100%

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	5	0	100%
2.	WARSITO ELLWEIN	4	0	80%
3.	M. NAZIR SIREGAR	5	0	100%
4.	ADI NUGROHO	5	0	100%

c. Rapat DPS

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris		

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Komite Audit atau Fungsi lainnya yang membantu Dewan Komisaris

5. Struktur komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki struktur komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki program kerja komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga bertugas untuk monitoring ketentuan-ketentuan Perusahaan terkait kebijakan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

1. Total Gearing Ratio (Maksimum 40 kali)	20.85 kali
2. Current Ratio Minimal 120%	514 %
3. Return On Assets	5.1%
4. BOPO	68.40%
5. Hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)	Baik

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Kepala Bagian Pelayanan & IT	Pelayanan & IT

2. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

PT. Jamkrida Jateng telah memiliki fungsi Internal Audit yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit merupakan Fungsi yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan. Fungsi Internal Audit akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

b. Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal

Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Internal Audit di PT. Jamkrida Jateng merupakan fungsi yang independen karena berada langsung di bawah Direktur Utama.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di semua fungsi kerja PT. Jamkrida Jateng diantaranya :

1. Divisi Customer Relation
2. Departement IT & Pelayanan
3. Departemen Penjaminan Risiko
4. Divi Finance, Accounting & Investasi
5. Unit HRD & GA
6. Unit Legal & Compliance

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Fandy Alvian
Pendidikan Terakhir
S1 Akuntansi, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.
Pengalaman Kerja
Admin Supervisor at PT Handal Duta Kinarya (2013-2014)
Junior Auditor KAP RMR & Rekan /
Accounting & Tax Consultant Widjojo Kusumo, BKP, CPA (2015-2017)

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Sampai dengan 31 Desember 2018 Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 1 (satu)

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit dibuat sebulan sekali, sama seperti periode pemeriksaan internal audit. Laporan Internal Audit berisi rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing fungsi dan tanggapan dari masing-masing fungsi terkait rekomendasi tersebut. Laporan Internal Audit disampaikan langsung oleh internal audit kepada direktur utama

3. Fungsi auditor eksternal

Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2015	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD (AP.0430)	Rp.35.000.000,-
2016	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD (AP.0430)	Rp.35.000.000,-
2017	KAP ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	J. ANWAR HASAN, CPA. (AP.0091)	Rp.40.000.000,-
2018	KAP RICHARD RISAMBESSY DAN REKAN	SALMON SIHOMBING (AP.0287)	Rp. 70.000.000,-

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk appetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

Direksi Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya

Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang (*forward looking*) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (*risk appetite*) yang didefinisikan oleh Direksi

4. Struktur organisasi sistem informasi

Dalam struktur organisasi sistem informasi masuk ke dalam fungsi Pelayanan dan IT

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Teknologi informasi yang digunakan di perusahaan adalah Aplikasi App-Line dan CMS. Untuk pengendalian internalnya adalah pada fungsi-fungsi tertentu hanya dapat melakukan akses fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi tersebut, satu fungsi tidak bisa mengakses fitur dari fungsi lainnya.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, *economic capital model* merefleksikan *profile* risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
- Pemantauan risiko

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari :

- Gaji Bulanan
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus Akhir Tahun
- Bonus Kinerja (Jasa Produksi)
- Tunjangan Pertengahan Tahun

Sedangkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut :

- Upah bulanan
- Tunjangan Hari Raya
- Biaya kehadiran dalam meeting
- Bonus Akhir tahun
- Tunjangan Pertengahan Tahun
- Bonus Kinerja (Jasa Produksi)

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi terdiri dari :

- Mobil Dinas
- Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja
- Supir/*Driver*
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
- Penggantian biaya transportasi
- Penggantian biaya komunikasi
- Cuti tahunan dan cuti masa kerja
- DPLK

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris terdiri dari :

- Asuransi Jiwa
- Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
- Tunjangan transportasi
- BPJS Ketenagakerjaan
- DPLK

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 737.242.000,-	Rp. 127.900.000,-

Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 291.722.400,-	Rp. 22.050.000,-

DPS	Jumlah DPS	-	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	-	-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2 (dua)		
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah		2 (dua)	

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- | | |
|---|------|
| 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 5.75 |
| 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah | 1.25 |
| 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1.25 |
| 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 1.91 |

F. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih. yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. NAZIR SIREGAR	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
2.	ADI NUGROHO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
3.	SUJARWANTO DWIATMOKO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
4.	WARSITO ELLWEIN	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin

G. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris. dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain. anggota Dewan Komisaris lain. anggota DPS lain. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris. dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain. anggota Dewan Komisaris. anggota DPS. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. NAZIR SIREGAR	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
2.	ADI NUGROHO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang		X		X	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi. anggota Dewan Komisaris lain. anggota DPS. dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
2.	WARSITO ELLWEIN	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang		X		X	

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki DPS						

H. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Belum terdapat pengunduran diri maupun pemberhentian Auditor Eksternal

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan tidak terdapat transaksi material dengan pihak terkait

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
1.	Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan				

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan tidak terdapat informasi material lainnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Sampai dengan 31 Desember 2018 Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	-	-	-
2.	-	-	-

7. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMT	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi. dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan			
Dalam proses penyelesaian di internal			
Belum diupayakan			
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	X	X
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	X	X
Total	X	X

KILAS BALIK PERUSAHAAN



11 Desember 2018
Penandatanganan kerjasama PT Jamkrida Jateng, dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) dan Kadin Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang

Kamis 27 September 2018
PT Jamkrida Jateng menjadi Tuan Rumah dari Pelatihan Tools LPDB Jamkrida se-indonesia



PT Jamkrida Jateng turut serta dalam mensukseskan Tenis Meja Piala Gubernur dan DPRD Prov Jawa Tengah di Magelang pada hari Sabtu 8 September 2018

Kamis tanggal 16 Agustus 2018 PT Jamkrida Jateng mengadakan Sosialisasi Suretyship dengan UPT Bina Marga dan cipta karya provinsi jawa tengah dan jasa konstruksi



Senin tanggal 16 Juli 2018, FORKOM Jamkrida se-Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi di Semarang



Rabu, 6 Juni 2018, PT. Jamkrida Jateng mengadakan Buka Bersama dan Silaturahmi Karyawan. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi seluruh karyawan PT. Jamkrida Jateng



Kunjungan Kerja PT. Jamkrida Jateng Bersama Komisi C DPRD Prov. Jateng di PT. Jamkrida Jabar pada 30 Mei 2018



Selasa 27 Maret 2018, PT. Jamkrida Jateng mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017. Pada rapat kali ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Jamkrida Jateng yaitu perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dari KPRI Bhakti Praja, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rabu 21 Maret 2018, PT. Jamkrida Jateng dan Dinas PU Bina Marga Jawa Tengah melakukan penandatanganan kontrak 17 paket pekerjaan.



Tanggal 19 Januari 2018, PT. Jamkrida Jateng menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Bank Jateng.

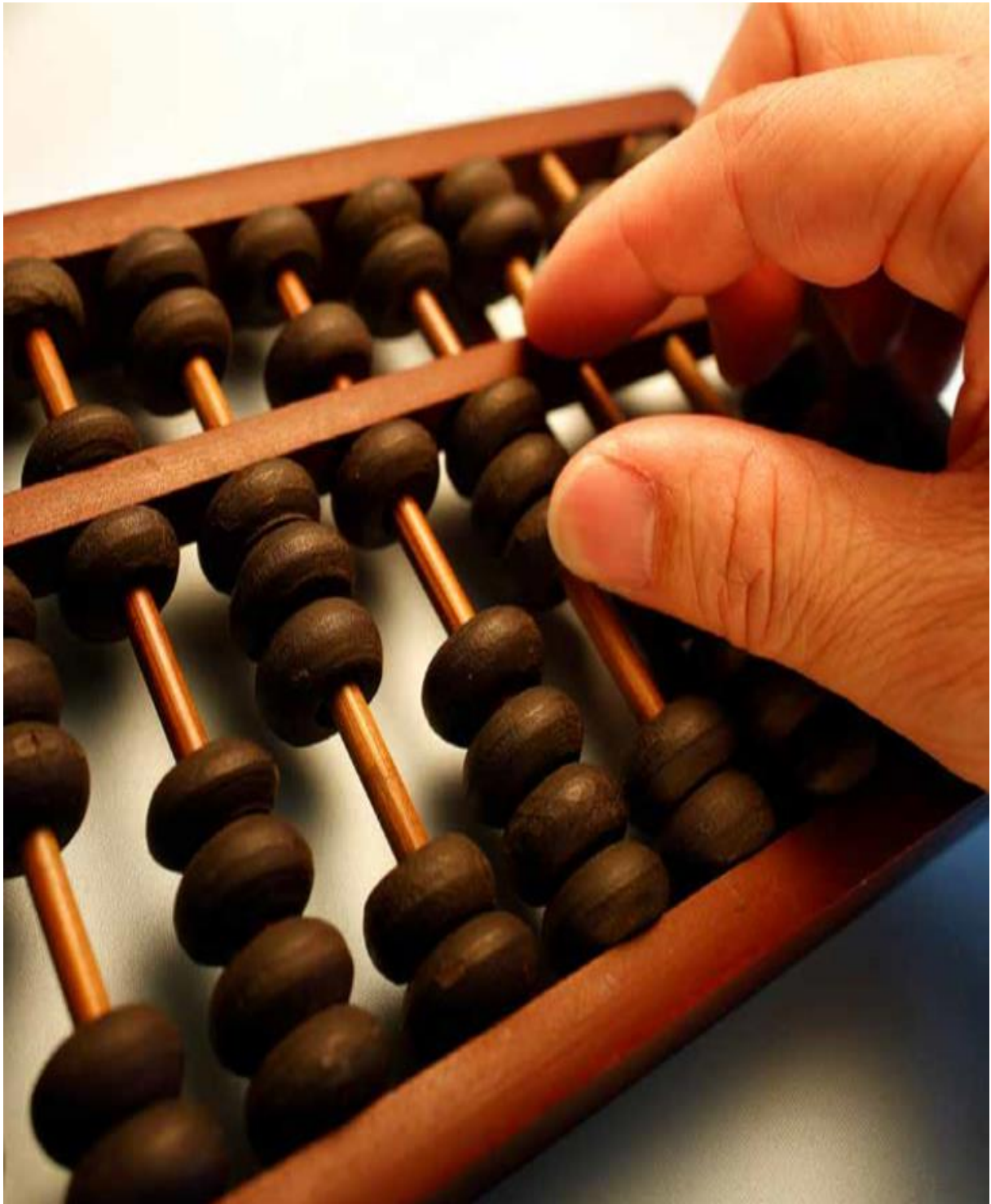
AKTIVITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL

17 Desember 2018, PT. Jamkrida Jateng menyerahkan bantuan sembako terhadap korban banjir Kelurahan Kaligawe sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility)



Selasa 21 Agustus 2018 PT Jamkrida Jateng menyerahkan hewan qurban kepada Masjid An-Nur Karangroto Genuk dalam rangka pelaksanaan salah satu program *Corporate Social Responsibility*

LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	53,821,899,148	36,902,421,969
Investasi		
Deposito Berjangka	89,450,000,000	78,700,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	27,488,300,000	27,571,500,000
Piutang IJP	466,190,145	1,629,467,185
Piutang Co-guarantee/ Reasuransi / Penjaminan Ulang	6,924,127,502	2,044,670,641
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,735,420,512	1,815,850,593
Biaya Dibayar Dimuka	32,062,502	355,375,000
Pajak Dibayar Dimuka		16,764,426
Aset lancar lain-lain	458,702,667	54,781,944
Jumlah Aset Lancar	180,376,702,476	149,090,831,757
Aset Tidak Lancar		
Beban dibayar dimuka	40,705,860,876	19,928,952,967
Aset tetap (Neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.325.633.712 dan Rp 662.544.875)	2,129,915,628	2,542,493,220
Aset tidak berwujud - bersih	1,863,870,594	1,215,802,029
Aset pajak tangguhan - bersih	1,117,312,656	102,008,286
Aset lain-lain - bersih	1,301,370,083	98,476,515
Jumlah Aset Tidak Lancar	47,118,329,836	23,887,733,017
JUMLAH ASET	227,495,032,312	172,978,564,774

Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Utang Klaim	1,526,268,710	1,188,491,272
IJP yang Ditangguhkan	22,660,411,073	12,066,427,275
Utang Pajak	1,497,818,996	438,209,783
Utang Premi Reasuransi	1,667,290,007	1,263,117,587
Utang Akuisisi	1,592,456,497	1,012,191,076
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	26,719,894	65,415,997
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	785,000,000
Cadangan Klaim	6,114,199,752	5,303,039,187
Liabilitas Lancar Lain - Lain	-	2,658,880,347
Jumlah Liabilitas Lancar	35,085,164,929	24,780,772,524
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
IJP yang Ditangguhkan	35,349,687,564	18,377,722,366
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2,645,692,696	1,628,735,567
Liabilitas Lancar lain-lain	141,076,500	-
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	38,136,456,760	20,006,457,933
JUMLAH LIABILITAS	73,221,621,689	44,787,230,457
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal	124,950,000,000	121,100,000,000
Tambahan Setoran Modal	20,000,000,000	
Cadangan		
a. Cadangan Umum	2,387,513,757	996,788,490
b. Cadangan Tujuan	450,136,109	-
Laba Ditahan		505,682,345
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8,601,731,255	5,582,372,874
Pendapatan Konprehensif lainnya	(2,115,970,496)	6,490,607
JUMLAH EKUITAS	154,273,410,624	128,191,334,317
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	227,495,032,312	172,978,564,774

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun Berakhir 31 Desember 2018
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	30,939,854,033	15,053,749,346
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(5,855,065,009)	(2,541,676,079)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan	(2,691,315,930)	(748,423,982)
JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH	22,393,473,095	11,763,649,285
Beban Klaim		
Beban Klaim Bruto	(25,854,575,206)	(12,956,044,099)
Klaim Co-guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	(17,726,214,338)	10,186,894,690
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(811,160,565)	(465,111,929)
Beban Klaim Lainnya	(556,515,644)	(198,077,250)
Jumlah Beban Klaim	(9,496,037,077)	(3,432,338,588)
Pendapatan Penjaminan Bersih	12,897,436,018	8,331,310,697
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Bunga	8,543,834,900	8,051,122,015
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,007,086,388	897,344,846
Pendapatan Operasional Lain - Lain	790,057,314	490,995,975
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	11,340,978,602	9,439,462,836
Beban Operasional Lainnya		
Beban Gaji dan Tunjangan	(6,806,978,540)	(4,972,516,124)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(982,323,787)	(497,383,230)
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	(6,070,914,443)	(5,419,622,569)
Beban Operasional Lain - Lain	-	(409,863,990)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(13,860,216,770)	(11,299,385,913)
Laba Operasional	10,378,197,849	6,471,387,620

Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	1,216,153,204	997,517,056
Beban Non Operasional	(40,255,984)	(25,924,388)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	1,175,897,221	971,592,668
Laba Sebelum Pajak	11,554,095,070	7,442,980,288
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pajak kini		
a. Pajak Final	1,858,241,146	1,604,647,609
b. Pajak Non Final	1,401,940,005	360,131,627
Pajak Tanggihan	(307,817,335)	(104,171,822)
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	2,952,363,816	1,860,607,414
Laba Bersih	8,601,731,255	5,582,372,874
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Rugi Laba		
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto	269,379,647	(51,778,726)
Pos yang akan direklasifikasikan ke Rugi Laba		
Bunga obligasi belum terealisasi-neto	(2,391,840,750)	58,269,333
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	6,479,270,151	5,588,863,481

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Berakhir 31 Desember 2018
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak	11,554,095,070	7,442,980,288
Penyesuaian :		
Depresiasi dan amortisasi	982,323,786	497,383,230
Pendapatan komprehensif lainnya	(2,122,461,104)	6,490,607
Imbalan pasca kerja	1,376,129,991	454,390,713
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	811,160,565	465,111,929
Pajak final	(1,858,241,145)	(1,604,647,608)
Perubahan:		
Piutang IJP	1,163,277,040	(1,122,241,469)
Piutang Co-guarantee/Reasuransi/Penjaminan Ulang	(4,879,456,861)	(1,167,471,202)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	80,430,082	(1,587,117,032)
Biaya Dibayar Dimuka	323,312,498	(205,375,000)
Pajak Dibayar Dimuka	16,764,426	(16,764,426)
Aset Pajak Tangguhan	(1,015,304,370)	(102,008,286)
Aset lancar lain-lain	(403,920,724)	(54,781,944)
Beban dibayar dimuka	(20,776,907,909)	(19,928,952,967)
Aset lain-lain - bersih	(1,202,893,567)	30,257,728
Utang Klaim	337,777,438	1,188,491,272
IJP yang Ditangguhkan	27,565,948,996	27,384,168,664
Utang Pajak	1,059,609,213	(986,705,428)
Utang Premi Reasuransi	404,172,420	20,797,811
Utang Akuisisi	580,265,420	460,782,191
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	(38,696,103)	(643,636,694)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(785,000,000)	785,000,000
Cadangan Klaim	811,160,565	465,111,929
Liabilitas Lancar Lain - Lain	(2,525,913,019)	398,666,068
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1,016,957,129	523,429,014
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi	12,474,589,837	12,703,359,388
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan/(Penempatan) Investasi	(13,933,613,444)	(45,929,584,000)
Perolehan aset tetap	(250,511,244)	(2,041,618,370)
Perolehan Aset tidak berwujud	(967,303,515)	(735,730,934)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(15,151,428,203)	(48,706,933,304)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal disetor	23,850,000,000	50,400,000,000
Cadangan		
Pembayaran deviden dan Jasa Produksi, dll	(4,253,684,455)	(1,885,286,198)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	19,596,315,545	48,514,713,801
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	16,919,477,179	12,511,139,885
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	36,902,421,969	24,391,282,083
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53,821,899,148	36,902,421,968

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Berakhir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan tahun 2017

Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba		Jumlah
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2017	70,700,000,000	441,997,031	(2,945,760,569)	74,087,757,600
Setoran modal				
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	200,000,000	-	-	200,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	200,000,000			200,000,000
Cadangan			(2,945,760,569)	(2,945,760,569)
Dana kesejahteraan	-	206,203,240	-	206,203,239
Dana sosial	-	117,830,423	-	117,830,423
Umum	-	736,440,142	-	736,440,142
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja		(51,778,726)		(51,778,726)
Revaluasi Obligasi		58,269,333		58,269,333
Laba tahun berjalan	-	-	5,582,372,874	
Saldo 31 Desember 2017	121,100,000,000	1,508,961,443	5,582,372,874	128,191,334,317
Setoran modal				
PemKab Grobogan	200,000,000			200,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	1,500,000,000			1,500,000,000
PemKab Temanggung	150,000,000			150,000,000
Pembkab Demak	2,000,000,000			2,000,000,000
PemProv Jawa Tengah	20,000,000,000			20,000,000,000
Cadangan			(5,582,372,874)	(5,582,372,874)
Dana kesejahteraan		(279,100,776)		(279,100,776)
Dana sosial		223,554,539		223,554,539
Umum		1,390,725,267		1,390,725,267
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja		269,379,647		269,379,647
Revaluasi Obligasi		(2,391,840,750)		(2,391,840,750)
Laba tahun berjalan			8,601,731,255	8,601,731,255
Saldo 31 Desember 2018	144,950,000,000	721,679,369	8,601,731,255	154,273,410,624

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, dengan Angka Perbandingan Tahun 2017
(dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. DASAR PENYUSUNAN

a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147A/SK/DIR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah diputuskan bahwa Perusahaan mulai tanggal 18 Desember 2017 mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Laporan keuangan tahun 2017 telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 97 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Prf. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Semarang. Deviden telah dibagikan sesuai dengan ketentuan RUPS Tahunan tersebut. Oleh karena itu maka keputusan ini berlaku secara prospektif kedepan dan bila ada koreksi atas penerapan kebijakan tersebut maka dampaknya akan dikoreksi di tahun berjalan.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2018 dengan angka komparatif 2017 telah disajikan sesuai dengan SAK dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk seluruh periode disajikan dalam laporan keuangan.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito berjangka seperti disebutkan di atas, dikurangi overdraft, jika ada.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijamin dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga..
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak- pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat transaksi terjadi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengukuran sesuai dengan SAK . Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan mengambil untung dalam jangka pendek. Saham yang diperdagangkan dalam bursa saham yang dimiliki untuk diperjual belikan termasuk dalam klasifikasi aset keuangan ini.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Merupakan Aset keuangan non-derivatif yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan ini antara lain Promes dan Kertas Berharga Lainnya.

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif. Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang co-guarantee, utang pajak, utang komisi/akuisisi, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut

Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan nilai wajar sebagai berikut:

- a. Nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik atau berdasarkan tehnik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Perusahaan mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.

- b. Dalam kasus lain, diperkenankan untuk menanggihkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengakui bahwa selisih yang ditanggihkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas .

Pengukuran Aset Keuangan Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:

- 1) **Pinjaman yang diberikan dan piutang**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- 2) **Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- 3) **Aset keuangan tersedia untuk dijual**
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

Pengukuran Liabilitas Keuangan Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan, biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
2. Pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan, karena Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh resiko, atau jika Perusahaan masih mengakui aset dikarenakan adanya keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut, maka Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait,
3. Liabilitas keuangan yang timbul dari kontrak jaminan keuangan,
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dibawah suku bunga pasar.

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi
- b. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif diakui dalam laba rugi
- c. Dividen atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi ketika ditetapkan hak entitas untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset atau liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga"

Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Perusahaan mengalihkan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah

Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Saling Hapus

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Perusahaan pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut kedalam aset keuangan yang memiliki karakteristik resiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, dibalik baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum

adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Jumlah pembalikan asset keuangan diakui dalam laba rugi.

2. **Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi**

Jika penurunan dalam nilai wajar atas asset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti obyektif bahwa asset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun asset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibalik melalui laporan laba rugi.

e. **Piutang Co - Guarantee/ Reasuransi**

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang reasuransi pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Account*), namun pembayaran belum dilakukan.

f. **Beban dibayar dimuka**

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban *co-guarantee*, beban reasuransi, diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan imbalan jasa penjaminan.

Fee based income, beban bank pelaksana dan beban akuisisi agen dibayar dimuka diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan.

g. **Aset tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan	4 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Partisi	4 tahun

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikutan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi di perhitungkan dalam laporan laba rugi untuk periode/ tahun bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

h. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

i. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan .

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP), pendapatan komisi reasuransi dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, beban fee based income-bank pelaksana, beban co-guarantee dan beban reasuransi diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan komisi reasuransi diakui seluruhnya pada saat pembayaran IJP ke reasuransi dilakukan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan berdasarkan struktur biaya (penjaminan kredit) dan untuk suretyship berdasarkan jasa administrasi yang telah ditetapkan.

Beban fee based income-bank pelaksana, beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan, sedangkan beban co-guarantee dan beban reasuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income-bank, beban komisi agen, beban co guarantee dan beban reasuransi.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminan atau terdapat pengajuan klaim yang diterima oleh Perusahaan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

k. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses telaah lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

l. Cadangan Klaim

Secara keseluruhan, cadangan klaim yang dibentuk ditentukan berdasarkan alternatif berikut mana yang lebih besar:

0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
Penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan

m. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat dan menyalurkan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK 24 "Imbalan Pascakerja". Pengakuan Kewajiban tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini. Pajak kini diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian.

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, ketika hasil banding tersebut telah ditetapkan.

o. Standar Akuntansi Baru, Revisi dan Interpretasi berlaku efektif 1 Januari 2019

1. ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
Interpretasi ini diterapkan pada transaksi valuta asing (atau bagian darinya) pada saat entitas mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka sebelum entitas mengakui aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya).
2. ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46 pajak penghasilan diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan

p. Penggunaan Estimasi

Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Asumsi tersebut mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3 KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas		
- Kas	487,800	6,552,000
Setara Kas Operasional		
- Bank Mandiri Banyumanik	1,021,482,742	1,458,441,276
- Bank Mandiri Banyumanik	11,925,032	1,662,442,652
- Bank Mandiri Banyumanik	278,577,369	-
Setara Kas IJP	51,969,426,205	33,774,986,041
Jumlah	53,281,899,148	36,902,421,969

4 INVESTASI

Rincian investasi terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Deposito Berjangka	89,450,000,000	78,700,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	27,488,300,000	27,571,500,000
Jumlah	116,938,300,000	106,271,500,000

5 PIUTANG IJP

Jumlah saldo piutang IJP per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang IJP	466,190,145	1,629,467,185
Jumlah	466,190,145	1,629,467,185

6 PIUTANG Co-GUARANTEE / REASURANSI/ PENJAMINAN ULANG

Jumlah saldo piutang co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang co-guarantee/ reasuransi/ penjaminan ulang	6,924,127,502	2,044,670,641
Jumlah	6,924,127,502	2,044,670,641

7 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Jumlah saldo pendapatan iuran jasa penjaminan yang masih harus diterima per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,735,420,512	1,815,850,593
Jumlah	1,735,420,512	1,815,850,593

Pendapatan yang harus diterima merupakan pendapatan iuran atas jasa penjaminan yang masih harus diterima.

8 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - LANCAR

Jumlah saldo biaya dibayar dimuka lancar per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sewa Kantor	32,062,502	207,375,000
Pajak Penghasilan 25		16,764,426
Lain-lain		148,000,000
Jumlah	32,062,502	372,139,426

9. ASET TETAP - BERSIH

Jumlah saldo aset tetap netto per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	2018			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	991,389,000	-	-	991,389,000
Peralatan Komputer	536,625,620	62,553,000	-	599,178,620
Peralatan Kantor	870,339,640	157,195,900	-	1,027,535,540
Partisi	806,683,835	30,762,344	-	837,446,179
Jumlah	3,205,038,095	250,511,244	-	3,455,549,339
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	797,770,564	123,923,625	-	203,694,189
Peralatan Komputer	194,762,466	138,806,290	-	333,568,756
Peralatan Kantor	324,401,469	191,638,258	-	516,039,727
Partisi	63,610,376	208,720,663	-	272,331,039
Jumlah	662,544,875	663,088,836	-	1,325,633,711
Nilai Buku	2,542,493,220			2,129,915,628
	2017			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	114,137,000	877,252,000	-	991,389,000
Peralatan Komputer	318,028,500	218,597,120	-	536,625,620
Peralatan Kantor	655,247,890	215,091,750	-	870,339,640
Partisi	76,006,335	730,677,500	-	806,683,835
Jumlah	1,163,419,725	2,041,618,370	-	3,205,038,095
Amortisasi Penyusutan				
Kendaraan	22,821,106	56,949,458		79,770,564
Peralatan Komputer	89,405,902	105,356,564		194,762,466
Peralatan Kantor	173,317,978	151,083,491		324,401,469
Partisi	14,163,896	49,446,480		63,610,376
Jumlah	299,708,882	362,835,993		662,544,875
Jumlah Aset Tetap Netto	863,710,843			2,542,493,220

Beban penyusutan tahun 2018 dan 2017 masing-masing berjumlah Rp 663.088.837 dan Rp 362.835.993,-

10. ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Jumlah saldo aset tidak berwujud - netto per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	2018			saldo Akhir
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	1,400,581,872	967,303,515		2,367,885,387
Jumlah	1400,581,872	967,303,515		2,367,885,387
Amortisasi				
Perangkat Lunak	184,779,843	319,234,951		504,014,794
Jumlah	184,779,843	319,234,951		504,014,794
Jumlah Aset Neto	1,215,802,029			1,863,870,594
	2017			saldo Akhir
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	664,850,938	735,730,934	-	1,400,581,872
Jumlah	664,850,938	735,730,934	-	1,400,581,872
Amortisasi				
Perangkat Lunak	50,232,606	134,547,237	-	184,779,843
Jumlah	50,232,606	134,547,237	-	184,779,843
Jumlah -Neto	614,618,332		-	1,215,802,029

11. ASET LAIN - LAIN

PT Jamkrida Jateng belum mempunyai kantor sendiri dan masih menggunakan bekas rumah dinas pejabat Pemprov Jateng. Sehubungan dengan berkembangnya Perusahaan, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian ruangan yang perbaikannya dilakukan secara bertahap. Biaya tersebut disusutkan selama 10 tahun untuk menantisipasi kalau nanti harus pindah kantor. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 nilai bukunya masing-masing berjumlah Rp 1.301.370.097 dan Rp 98.476.515.

12. UTANG KLAIM

Jumlah saldo utang klaim per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah masing-masing sebesar Rp. 1.526.268.710 dan Rp. 1.188.491.272,-.

13. IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
IJP ditangguhkan lancar	22,660,411,073	12,066,427,275
IJP ditangguhkan - tidak lancar	35,349,687,564	18,377,722,366
Jumlah	58,010,098,637	30,444,149,641

14. PERPAJAKAN

Jumlah saldo perpajakan per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PPh 21	-	16,764,426
Jumlah	-	16,764,426

b. Utang Pajak

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pajak Penghasilan Badan	946,383,176	360,131,627
Pajak penghasilan 25	455,556,829	-
Pajak penghasilan 21	95,867,011	76,203,736
Pajak penghasilan 23	11,980	1,874,420
Jumlah	1,497,818,996	438,209,783

c. Pajak Tangguhan

	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	130,857,253	254,239,282	385,096,535
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	116,277,982	202,790,141	319,068,123
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	49,519,313	(49,519,313)	-
Akrual bunga deposito	(42,165,617)	(75,136,848)	(117,302,465)
Revaluasi harga pasar obligasi	(19,423,111)	797,280,252	777,857,141
Akrual bunga obligasi	(133,057,535)	(114,349,144)	(247,406,679)
Jumlah	102,008,285	1,015,304,370	1,117,312,656

d. Pajak Penghasilan Badan

Estimasi perhitungan pajak berdasarkan laporan laba rugi kena pajak sebagai berikut:

	31 Desember 2018
Laba sebelum pajak	11,554,095,070
Koreksi beda waktu	
Imbalan pasca kerja	1,376,129,991
Kenaikan Cadangan klaim	811,160,565
Akrual Bunga Deposito	(300,547,390)
Akrual Bunga Obligasi	(457,396,575)
Koreksi beda tetap	
Pendapatan bunga	(7,785,890,934)
Kupon obligasi	(2,007,086,388)

Kenikmatan natura	390,644,139		
Biaya promosi/ pemasaran	1,311,429,072		
Biaya jamuan & sumbangan	1,186,796,199		
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	6,079,333,749		
Pembulatan	6,079,333,000		
Taksiran pajak penghasilan - non final			
Penghasilan kena pajak fasilitas	<u>4,800,000,000</u>	x 6,079,333,000	= 943,145,962
	30,939,854,033		
Penghasilan kena pajak non fasilitas	= 6,079,333,000 - 943,145,962		= 5,136,187,038
Pajak penghasilan -fasilitas		943,145,962 x 50% x 25%	= 117,893,245
Pajak penghasilan - non fasilitas		5,136,187,038 x 25%	= 1,284,046,760
Pajak penghasilan - non final			<u>1,401,940,005</u>
Pajak di bayar di muka			
Pajak penghasilan pasal 25			(455,556,829)
Pajak penghasilan pasal 23			
Pajak Penghasilan pasal 29			<u>946,383,176</u>
terutang			
Taksiran pajak penghasilan - final			
- Pendapatan bunga deposito	6,702,124,081	x 20%	= 1,340,424,816
- Pendapatan jasa giro	1,083,766,853	x 20%	= 216,753,371
- Pendapatan deviden	2,007,086,388	x 15%	= 301,062,958
			<u>1,858,241,145</u>

15. HUTANG PREMI REASURANSI

Jumlah saldo hutang premi reasuransi per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hutang Reasuransi	1,667,290,007	1,263,117,587
Jumlah	<u>1,667,290,007</u>	<u>1,263,117,587</u>

16. HUTANG AKUISISI

Jumlah saldo utang akuisisi per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hutang Akuisisi	1,592,456,497	1,012,191,076
Jumlah	<u>1,592,456,497</u>	<u>1,012,191,076</u>

17. HUTANG IJP C0-GUARANTEE / PENJAMINAN ULANG

Jumlah saldo hutang IJP per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang <i>co Guarantee</i>	26,719,894	65,415,997
Jumlah	<u>26,719,894</u>	<u>65,415,997</u>

18. CADANGAN KLAIM

Jumlah saldo cadangan klaim per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Cadangan Klaim	6,114,199,752	5,303,039,187
Jumlah	6,114,199,752	5,303,039,187

19. LIABILITAS LAIN - LAIN

Jumlah saldo liabilitas lain - lain per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Liabilitas Titipan IJP	-	398,666,069
Liabilitas Lain - Lain	-	2,260,214,278
Jumlah	-	2,658,880,347

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sebagai bagian dari Perusahaan Daerah, Perusahaan juga wajib mengikuti Peraturan Gubernur Kepala Daerah terkait dengan ketentuan atas penyisihan kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Jawa Tengah No.2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 19 bahwa anggota Dewan Komisaris mendapat jasa pengabdian secara kolektif sebesar 2% dari laba sebelum pajak dan di pasal 40 mengatur bahwa Dewan Direksi mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif sebesar 5% dari laba sebelum pajak pada akhir tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.

Jumlah imbalan pasca kerja dan jasa pengabdian yang disebabkan ke rugi laba tahun 2018 masing-masing sebesar Rp. 561.684.610 dan Rp. 733.606.441.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018/2017
Metode	<i>Projected Unit Credit Method</i>
Tingkat diskonto	8,46% / 6,95%
Jumlah Karyawan	49 / 44
Tingkat kematian	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia III 2011 (TMI III -2011)
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat cacat	5% dari tabel mortalitas dari usia 20 hingga 54 tahun
Tingkat pengunduran	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011
Usia Pensiun	56 tahun

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Imbal Jasa Pengabdian	1,673,260,829	769,920,119
Imbalan Pasca Kerja	972,431,867	858,815,448
	2,645,692,696	1,628,735,567

Ikhtisar perhitungan imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2018 dan 2017 berdasarkan laporan Aktuaris PT Sigma Prima Solusindo Nomer 248/SPS/R-I/I/2019 dan 247/SPS/R-I/I/2019 keduanya tertanggal 1 April 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada awal tahun	769,920,119	315,529,406
Biaya Bunga	49,640,512	-
Koreksi estimasi tahun lalu	(55,668,141)	-
Biaya Jasa Kini	243,334,297	454,390,713
Nilai Ekspektasi Pembayaran Manfaat	(3,901,341)	-
Nilai Ekspektasi dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti pada akhir tahun	1,003,325,446	769,920,119
(Keuntungan) / Kerugian aktuarial atas Kewajiban	(30,893,579)	-
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada akhir tahun - Aktual	972,431,867	769,920,119

Sejak tahun 2018 Perusahaan menghitung kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aktuarial yang sebelumnya dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri. Perhitungan oleh aktuarial dilakukan secara retroaktif dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen Perusahaan mencatat koreksi atas selisih perhitungan aktuarial secara prospektif, oleh karenanya seluruh penyesuaian atas perhitungan aktuarial dibebankan dan dicatat pada tahun berjalan (2018), karena manajemen menganggap tidak praktis untuk mencatat dampak penyesuaian aktuarial secara retroaktif mengingat pengaruhnya terhadap perhitungan laba bersih dan laba bersih setelah pajak yang telah disetujui dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun sebelumnya.

Dampak dari koreksi perhitungan aktuarial terhadap saldo imbalan pasca kerja tahun lalu sebesar Rp.55.668.141 dibandingkan pada laba rugi tahun berjalan.

21. MODAL DISETOR

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS - LB) PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Akta No. 72 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro Notaris di Semarang tanggal 21 November 2018, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 200.000.000.000,- terbagi dalam 20.000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000.000,-, dan dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebanyak 12.495 lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2018			
Pemegang Saham	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	12,000	96.04%	120,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.60%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.60%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.44%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	40	0.32%	400,000,000
Jumlah	12,495	100%	124,950,000,000

31 Desember 2017			
Pemegang Saham	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	12,000	99.1%	120,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	50	0.4%	500,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	40	0.3%	400,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	20	0.2%	200,000,000
Jumlah	12,110	100%	121,100,000,000

22. CADANGAN

Saldo cadangan per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Umum	2,387,513,757	996,788,490
Dana kesejahteraan	-	279,100,776
Dana sosial	383,040,698	159,486,158
Jasa produksi	67,095,411	67,095,411
Jumlah	2,837,649,865	1,502,470,835

Pembagian deviden deviden Perseroan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 71 ayat (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Pasal 71 ayat (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka pembagian laba seharusnya dari laba bersih bukan dari laba komprehensif.

23. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

Jumlah Pendapatan Imbal Jasa Piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	30,939,854,033	15,053,749,346
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(5,855,065,009)	(2,541,676,079)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan	2,691,315,930	(748,423,982)
Jumlah	22,393,473,095	11,763,649,285

24. BEBAN KLAIM

Jumlah beban klaim untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Klaim Bruto	25,854,575,206	12,956,044,099
Klaim Co-guarantee/penjaminan	(17,726,214,338)	(10,186,894,690)
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	811,160,565	465,111,929
Beban Klaim Lainnya	556,515,644	198,077,250
Jumlah	9,496,037,077	3,432,338,588

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Bunga	8,543,834,900	8,051,122,015
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,007,086,388	897,344,846
Pendapatan Operasional Lain - Lain	790,057,314	490,995,975
Jumlah	11,340,978,602	9,439,462,836

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Administrasi dan Umum	6,070,914,443	5,419,622,569
Beban gaji dan Pegawai	6,806,978,540	4,972,516,124
Beban Penyusutan dan Amortisasi	982,323,787	497,383,230
Beban Operasional Lain - Lain	-	409,863,990
Jumlah	13,860,216,770	11,299,385,913

27. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan Beban non Operasional yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Non Operasional	1,216,153,204	997,517,056
Beban Non Operasional	(40,255,984)	(25,924,388)
Jumlah	1,175,897,221	971,592,668

28. MANAJEMEN RISIKO

a. Analisa Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi empat kategori risiko yang harus dihadapi:

1. Risiko teknis yang menyangkut bidang Penjaminan dan klaim

Dalam bidang Penjaminan terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut Perusahaan selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi yang wajar dan berhati-hati, melakukan survey risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas para underwriternya dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui secara berkala.

Perusahaan melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi tersebut.

Risiko dalam hal klaim mungkin terjadi apabila terdapat beberapa klaim besar yang terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Nilainya bisa sangat besar. Untuk mengantisipasi hal ini selain program reasuransi yang baik, Perusahaan juga menempatkan sebagian besar investasinya dalam bentuk yang dana-dana yang likuid sehingga liabilitas Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang dapat terpenuhi.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan dan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas di bank, deposito berjangka dan piutang. Jumlah eksposur maksimum risiko kredit sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

4. Risiko keuangan yang menyangkut pengelolaan dana

Risiko pengelolaan dana dilakukan dengan dua pendekatan, yang pertama adalah manajemen cash flow dengan mempersingkat waktu penagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sehingga dana dapat lebih cepat diinvestasikan. Kedua, untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global dan lokal, perubahan situasi politik, perubahan peraturan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keamanan investasi, Perusahaan menerapkan penempatan investasi dengan portfolio yang berimbang dalam berbagai instrumen seperti deposito berjangka, obligasi, dan menghindari investasi yang berisiko tinggi.

5. Risiko Hukum menyangkut kemungkinan adanya tuntutan secara hukum

Sebagai perusahaan Penjaminan, Perusahaan tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan-tuntutan secara hukum. Hal ini bisa terjadi akibat ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung permasalahan atau adanya kelemahan dalam kontrak.

Upaya Perusahaan dalam mengantisipasi risiko ini adalah dengan memiliki tenaga yang handal dibidang hukum, menyempurnakan kontrak-kontrak yang ada, melengkapi semua persyaratan sesuai peraturan yang ada dan bekerja sama dengan konsultan hukum untuk membenahi perangkat administrasi hukum di Perusahaan.

6. Risiko teknologi dan Informasi yang menyangkut potensi kerugian dari sistem informasi

Sangat cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat suatu peristiwa internal maupun eksternal berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kejadian seperti serangan virus, pembajakan informasi, bencana alam, gangguan jaringan atau sistem dapat menimbulkan kerugian melalui biaya restorasi data yang cukup besar dan menurunnya kualitas pelayanan.

Untuk mengendalikan risiko ini Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan system keamanan untuk proteksi, melakukan *back up* support yang lebih teratur, menyiapkan *Contingency Plan* untuk mengatasi keadaan darurat, mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem informasi dengan konsekuen.

b. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas Perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan :		
Kas dan Setara Kas	53,821,899,148	53,821,899,148
Investasi		
Deposito Berjangka	89,450,000,000	89,450,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	30,677,421,000	27,488,300,000
Piutang IJP	466,190,145	466,190,145
Piutang Co-guaranteee / Reasuransi / Penjaminan Ulang	6,924,127,502	6,924,127,502
Jumlah	181,339,637,795	178,150,516,795
Liabilitas Keuangan :		
Utang Klaim	1,526,268,710	1,026,268,710
Utang Pajak	1,497,818,996	1,613,122,764
Utang Premi Reasuransi	1,667,290,007	1,667,290,007
Utang Akuisisi	1,592,456,497	1,592,456,497
Utang IJP Co-guaranteee / Penjaminan Ulang	26,719,894	26,719,894
Liabilitas Lancar Lain - Lain	141,076,500	141,076,500
Jumlah	6,451,630,604	6,066,934,372

29. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun laporan keuangan tahun 2017 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2018.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018.

31. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019.

PERNYATAAN

Laporan Tahunan ini telah disiapkan untuk dan hanya pada kepada Perusahaan sebagai badan hukum dan TIDAK disampaikan kepada orang lain. Perusahaan, para Direktur, karyawan, agen atau penasihat lainnya, Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada orang lain kepada siapa dokumen ini diperlihatkan, atau ke tangan siapa dokumen ini diterima.

Informasi tertentu yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk informasi apa pun mengenai strategi, rencana, atau kinerja keuangan atau operasi perusahaan di masa depan, merupakan “pernyataan berwawasan ke depan”.

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup semua hal yang bukan fakta sejarah. Contoh pernyataan berwawasan ke depan meliputi target dan panduan keuangan yang terdapat dalam dokumen ini secara khusus berkaitan dengan ekuitas, rasio solvabilitas modal, rasio operasi, rilis cadangan tahun sebelumnya, pengurangan biaya, pengurangan biaya dan akuisisi, hasil investasi, keuntungan terealisasi dan keuntungan yang belum direalisasi dan rentang selera risiko. Sesuai sifatnya, semua pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau mungkin tidak

terjadi di masa depan atau di luar kendali perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan bukan jaminan kinerja di masa depan. Hasil aktual operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan pengembangan sektor bisnis tempat perusahaan beroperasi dapat berbeda secara material dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini, misalnya secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari, tetapi tidak terbatas pada, kondisi bisnis ekonomi domestik dan nasional,

Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini mencerminkan pengetahuan dan informasi yang tersedia pada tanggal persiapan dokumen ini. Direksi secara tegas menyangkal kewajiban apa pun atau melakukan upaya untuk memperbarui atau merevisi secara terbuka pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diminta untuk melakukannya oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai ramalan laba. Baik konten situs web Jamkrida Jateng maupun konten dari situs web lain yang dapat diakses dari *hyperlink* di situs Jamkrida Jateng dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian dari, dokumen ini.

Informasi Kontak

Kantor Pusat

PT Jamkrida Jateng
Jl Setiabudi No 128 Banyumanik
Semarang
Telp 024 7477 666
Fax 024 7497 0001
www.jamkrida-jateng.co.id

Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Industri Jasa
Keuangan Non Bank (IKNB)
Menara Mulia lantai 11
Jl Gatot Subroto No. 42
Jakarta
Telp 021 29600000
Fax 021 3857917
www.ojk.go.id

Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Biro Perekonomian
Jl Pahlawan No. 9 Mugassari
Semarang Selatan-Kota Semarang
Telp : 024 831 1174, 024 831 1183
Fax : 024 8318890
<http://biroperekonomian.jatengprov.go.id>

Auditor

Richard Risambessy & Rekan
Plaza Barat Lt. 9 No.10 A ITC
Cempaka Mas, JL. Letnan Jenderal
Suprpto Jakarta Pusat, 10640
Telepon: +62 21 42888628
Fax : +62 21 42888627

Bank Kustodi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta
Telp 021 5265045
Fax 021 5274477
www.bankmandiri.co.id

Jaringan Kantor Pelayanan

Banyumas

Gedung PLUT

Jl. Senopati, Dukuhwaluh, Kembaran

Kabupaten Banyumas

Kudus

Jl. Kudus – Pati KM. 08

Jekulo - Kudus

Pekalongan

Jl. Kertijayan No. 29

RT 23 RW 08

Kabupaten Pekalongan

Solo

Gedung HIPMI

Jl. Bhayangkara No. 57

Baron - Surakarta

Purwodadi

Ruko Depan Hutan Kota Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 16

Purwodadi

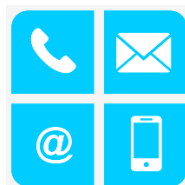
Magelang

Jl. Pahlawan

Kelurahan Potrobangsari

Magelang

66 **PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi **MAMPU** menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat**



PT Jamkrida Jateng
Jl Setiabudi No 128, Banyumanik, Semarang
Telp 024 7477 666 Fax 024 7497 0001
www.jamkrida-jateng.co.id